

References

- Albrow, M. (2004). *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Alfiah, S. (2016). *E-Budgeting (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azhari. (2011). *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2002). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI.
- David, F. R. (2011). *Concept of Strategic Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Denhardt, R. B. & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549-559.
- Effah, J., & Nuhu, H. (2017). Institutional Barriers To Digitalization Of Government Budgeting In Developing Countries: A Case Study Of Ghana. *The Electronic Journal Of Information Systems In Developing Countries*. 82(1), 1-17.

- Fajar, M., & Yulianto, A. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum "Normatif & Empiris"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gallego, A. I., Rodríguez, D. L., & García, S. I. M. (2010). Are Determining Factors Of Municipal E-Government Common To A Worldwide Municipal View? An Intra-Country Comparison. *Government Information Quarterly*. 27(4), 423-430.
- Hildreth, E. D. *Budget Theory In The Public Sector*. Westport: Quorum Books.
- Idhamsyah, A. R., Saidi, M. D., & Razak, A. Budgetary Function of Parliament In Implementing The Regional Budget Revenue And Expenditure. *Journal of Public Administration*. 14(3), 20-31
- International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(8), 194-197.
- Keban, T., & Yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Issue*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media..
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 7, 52-70.
- Marzuki, M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, S. (2012). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika,.

- Nawawi, H. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rangkuti, F. (2004). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, A., Asterina, N., & Hidayani, R. (2016). Improving the transparency, inclusivity and impact of participatory budgeting in Indonesian cities. *Jurnal of Public Administration*. 6(2), 32-43
- Rosalina, V. W. (2016). *Implementasi E-Budgeting Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi: (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga)*.
- Ruslan, A., Saidi, M. D., & Razak, A. (2015). Budgetary Function Of Parliament In Implementing The Regional Budget Revenue And Expenditure.
- Siagian, P. S. (2006). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono, S. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, S., & Sri, M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesetyo, A. B., & Kasiyanto, K. (2016). Kebijakan Sistem Pemerintahan E Government di Kabupaten Tulungagung. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 1(1), 1-20.

- Susanto, M. (2013). *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwandiyanto, M. (2001). *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja, Edisi 1. Cetakan 14*. Yogyakarta: BPFE.
- Welsch., Hilton., & Gordon. (2000). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa)*, 1(1), 72-88.
- Yunita, M., & Nahartyo, E. (2017). *Analisis Keefektifan Penerapan E-Budgeting Untuk Mengurangi Penyelewengan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Zahra, M. (2017). *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Sistem E-Budgeting Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Di Kota Surabaya*. (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.)

Regulations

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Undang - Undang Dasar NKRI 1945.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

